

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP 2016)
PADA DINAS BINA MARGA PROVINSI JAWA TENGAH

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

A. WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Informasi tentang Profil Dinas Bina Marga						
a.	Visi dan Misi	Kepala Dinas	KA. Sub. Bag Program	2013	Soft copy dan Hard copy	5 tahun	Website
b.	Tugas Pokok dan Fungsi	Kepala Dinas	KA. Sub. Bag Program	2013	Soft copy dan Hard copy	5 tahun	Website
c.	Struktur Organisasi dan Profil Dinas Bina Marga	Sekretaris	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
d.	Sumber Daya Manusia	Sekretaris	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
e.	Informasi tentang Kedudukan atau Domisili Dinas Bina Marga beserta alamat lengkap	Sekretaris	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
f.	LHKPN Pejabat yang sudah diverifikasi	Kepala Dinas	Sekretaris Selaku PPID	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Selama berlaku
2.	Informasi tentang Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga						
a.	Nama Program dan Kegiatan	Kepala Dinas	KA. Sub. Bag Program	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website
b.	Penanggung jawab dan Pelaksana Program	Kepala Dinas	KA. Sub. Bag Program	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website
c.	Target dan Capaian Program dan Kegiatan	Kepala Dinas	KA. Sub. Bag Program	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website
d.	Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan	Kepala Dinas	KA. Sub. Bag Program	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website
e.	Anggaran Program dan Kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah	Kepala Dinas	KA. Sub. Bag Program	Setiap awal tahun	Soft copy dan Hard copy	2 tahun	Website
f.	Agenda penting Dinas Bina Marga						
	- Rencana Rakor, dll pada SKPD pada th. Berjalan	Sekretaris	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Setiap kegiatan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
	- Rencana pelaksanaan Diklat dll.	Sekretaris	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Setiap kegiatan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
	- Agenda penting lainnya	Sekretaris	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Setiap kegiatan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
3.	Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Bina Marga						
a.	Ringkasan Informasi Kinerja	Kepala Dinas	KA. Sub. Bag Program	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
b.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Kepala Dinas	KA. Sub. Bag Program	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
4.	Ringkasan Laporan Keuangan						
a.	Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran	Kepala Dinas	KA. Sub. Bag Keuangan	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
b.	Neraca	Kepala Dinas	KA. Sub. Bag Keuangan	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
c.	Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku	Kepala Dinas	KA. Sub. Bag Keuangan	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
d.	Daftar Aset dan Investasi	Kepala Dinas	KA. Sub. Bag Umum dan Kepegawaian	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
5.	Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik						
a.	Jumlah Permohonan Informasi Publik	Sekretaris	Sekretaris Selaku PPID	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
b.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan Informasi Publik	Sekretaris	Sekretaris Selaku PPID	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
c.	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan maupun yang ditolak	Sekretaris	Sekretaris Selaku PPID	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
d.	Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik	Sekretaris	Sekretaris Selaku PPID	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
e.	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh informasi publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi	Sekretaris	Sekretaris Selaku PPID	2015	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
f.	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh pejabat badan publik maupun pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan	Sekretaris	Sekretaris Selaku PPID	2015	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
6.	Informasi Peraturan, keputusan, dan atau ketetapan beserta rancangannya yang	Kepala Dinas	Sekretaris	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
	mengikat publik oleh Dinas Bina Marga						
7.	Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa						
a.	Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala Dinas	KA. Sub. Bag Program	Tiap proses pengadaan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
b.	Pengumuman proses pengadaan	Kepala Dinas	KA. Sub. Bag Program	Tiap proses pengadaan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website

B. WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

No.	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia	Jangka Waktu Penyimpanan	Jenis Media Yang Memuat Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Daftar Informasi Publik	Sekretaris	Sekretaris Selaku PPID	Setiap ada perubahan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website
2.	Rencana Strategis	Kepala Dinas	KA. Sub. Bag Program	2013	Soft copy dan Hard copy	5 tahun	Website
3.	Rencana Kerja Tahunan Dinas Bina Marga	Kepala Dinas	KA. Sub. Bag Program	Tahunan	Soft copy dan Hard copy	1 tahun	Website
4.	Pidato Sambutan Kepala Dinas Bina Marga dalam kesempatan	Kepala Dinas	Sekretaris	Setiap kegiatan	Soft copy dan Hard copy	Selama berlaku	Website

II. INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
1.	Biodata PNS (database)	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	TidakTerbatas	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2.	Dokumen/ Berkas/Arsip PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	TidakTerbatas	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	TidakTerbatas	<ul style="list-style-type: none"> Mengungkap data pribadi PNS Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
4.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5.	Daftar nilai DP-3 PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf - PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Melanggar HAM 	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6.	Data rekam medis PNS	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - Permenkes RI no. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (pasal 10) 	Melindungi hak dasar manusia (HAM) berdasarkan konstitusi	Tidak Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Mengungkap data pribadi PNS • Dapat merugikan PNS • Melanggar HAM 	<ul style="list-style-type: none"> • Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia • Untuk melindungi Keamanan dan kenyamanan PNS
7.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H. - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - PP No.100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dlm Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000. 	Sebagai dasar penetapan kebijakan dalam pembinaan PNS	Terbatas sampai dengan pelantikan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum.
8.	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan 	Untuk menjamin rekaman kegiatan dan peristiwa	Tidak terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Melindungi kerahasiaan dokumen
9.	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya 	Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat.	Selama proses pengadaan barang/ Jasa	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila dibuka menimbulkan	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
					penilaian tidak obyektif)	
10.	Dokumen Penawaran Kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j - Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Untuk menjamin persaingan usaha yang sehat.	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa selesai.	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektivitas penilaian
11.	Rencana Pembelian Tanah dan Properti	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf e angka 4	Merugikan ketahanan ekonomi nasional	Sampai selesainya proses pembebasan tanah	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur	Mencegah spekulasi tanah
12.	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30-37)	Melindungi kerahasiaan Database	Tak Terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat serta data
13.	Internet Protocol/ IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	Melindungi hak akses	Tak Terbatas	Penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses
14.	Bandwidth Managment	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 30)	Melindungi kestabilan bandwidth	Tak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth
15.	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Melindungi kerahasiaan Database	Tak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
16.	Sistem Keamanan Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf J; - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Melindungi kerahasiaan Database	Tak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
17.	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf J; - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Melindungi kerahasiaan Database	Tak Terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga keamanan jaringan komputer

NO.	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	ALASAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, ▪ Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus, ▪ Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus, ▪ Review Laporan Keuangan, 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i, - PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah - PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. - Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode etik Pengawasan Intern Pemerintah - Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a. 	LHP jika dikuasai oleh orang/pihak yang tidak terkait berpotensi terjadi penyalahgunaan LHP.	Tak terbatas	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi
Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Tengah

Ir. Agus Supriyanto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19620127 199003 1 008